

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah perubahan yang terjadi secara terus menerus dengan menggunakan berbagai proses untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan perkapita masyarakat di suatu wilayah secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang (Sadono Sukirno, 1985). Tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk menaikkan pendapatan suatu negara atau daerah melebihi tingkat pertumbuhan penduduk daerah tersebut.

Pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi memiliki pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi yaitu suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang dengan cara mengolah ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, serta peningkatan dalam berbagai hal (pengetahuan, keterampilan, kemampuan berorganisasi). Sedangkan pertumbuhan ekonomi yaitu suatu proses meningkatnya output perkapita secara terus menerus (Sadono Sukirno, 1996). Meskipun pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi memiliki definisi yang berbeda, namun pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi akan memperlancar sebuah

proses dalam pembangunan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dari keberhasilan sebuah proses pembangunan. Keberhasilan pembangunan ekonomi disuatu daerah atau negara dapat ditunjukkan dengan tiga nilai pokok (Todaro dan Smith, 2009) diantaranya :

1. Kecukupan (*Sustenance*), yaitu kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan akan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan serta keamanan dalam menjalankan kehidupannya.
2. Jati diri (*Self-esteem*), yaitu peningkatan jati diri manusia dalam wujud harga diri yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat.
3. Kebebasan (*Freedom from servitude*), yaitu kebebasan yang harus didapatkan oleh setiap masyarakat yang merupakan salah satu dari bagian hak asasi manusia (HAM).

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yaitu kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang-barang ekonomi dengan jumlah yang banyak kepada penduduknya dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan menurut Sukirno (1996) dalam (Sudirman, M. Alhudori, 2018) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses naiknya output perkapita suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga secara umum pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kemampuan dari suatu perekonomian di dalam memproduksi barang dan jasa suatu daerah dalam jangka waktu tertentu.

❖ **Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi diantaranya :

- **Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia merupakan subjek di dalam sebuah pembangunan, dimana cepat lambatnya proses pembangunan tergantung kepada seberapa besar kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia untuk melaksanakan proses pembangunan.

- **Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam merupakan tumpuan bagi negara-negara berkembang dalam melaksanakan proses pembangunan, namun sumber daya alam tidak dapat menjamin keberhasilan pembangunan apabila tidak diiringi dengan kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam tersebut.

- **Ilmu Pengetahuan dan Teknologi**

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan serta teknologi yang semakin pesat dapat mempercepat proses di dalam sebuah pembangunan.

- **Sumber Daya Modal**

Sumber daya modal dalam sebuah pembangunan dibutuhkan oleh manusia untuk mengolah sumber daya alam serta meningkatkan kualitas IPTEK.

- Budaya

Budaya dalam sebuah pembangunan dapat mempercepat proses pembangunan sekaligus dapat juga jadi penghambat dalam sebuah pembangunan.

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

Teori pertumbuhan Neo-klasik dikembangkan oleh Robert Solow dan Trevor Swan. Teori Neo-klasik ini memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk/tenaga kerja, akumulasi modal/kapital, tingkat kemajuan teknologi serta besarnya output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Model neo-klasik yang dikembangkan oleh Solow dan Swan ini, dipergunakan suatu fungsi produksi dengan bentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y(t) = T(t)K(t)^{\alpha}L(t)^{\beta}$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan bahwa besarnya tingkat output bergantung terhadap persediaan modal (K), tenaga kerja (L), serta teknologi (T), dimana α adalah tambahan produksi yang dihasilkan dari adanya tambahan satu unit modal dan β adalah tambahan produksi yang dihasilkan dari adanya tambahan satu unit tenaga kerja. Namun, dalam teori ini kemajuan teknologi diasumsikan sebagai variabel yang bersifat eksogen, dimana kemajuan teknologi ini dapat dilihat dari peningkatan *skill* atau teknik yang pada akhirnya produktivitas pun akan meningkat. Selain itu dengan digunakannya fungsi produksi tersebut, maka akan timbul salah satu konsekuensi, yaitu bahwa seluruh faktor yang tersedia dalam fungsi produksi tersebut baik persediaan modal (K), tenaga kerja (L) dan teknologi

(bersifat konstan) akan selalu digunakan secara penuh di dalam proses produksi. Hal ini dikarenakan dengan adanya fungsi produksi tersebut, maka seberapa banyak pun persediaan modal (K) ataupun tenaga kerja (L) yang tersedia akan terus dikombinasikan di dalam proses produksi, sehingga tidak akan ada lagi peluang mengenai adanya kelebihan ataupun kekurangan di dalam faktor produksi (Telisa, 2019:150-151).

Dalam teori Neo-klasik masih terdapat kekurangan yaitu teori ini masih belum dapat menjelaskan mengenai sumber-sumber pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang, dimana menurut teori ini rasio modal tenaga kerja di negara-negara berkembang sangat menjanjikan dalam mengembalikan tingkat investasi yang tinggi. Namun pada nyatanya, setelah menerapkan liberalisasi dalam perdagangan dan pasar domestik tersebut banyak negara berkembang yang tidak berkembang atau bahkan hanya berkembang sedikit serta gagal dalam menarik investasi asing. Dengan adanya perilaku aneh mengenai aliran modal dari negara berkembang tersebut menjadi pemicu adanya konsep pertumbuhan ekonomi endogen.

b. Teori Pertumbuhan Baru (*New Growth Theory*) : Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer pada tahun 1980-an. Pada dasarnya teori pertumbuhan endogen merupakan teori yang dikembangkan untuk memperbaiki teori pertumbuhan neo-klasik dimana dalam teori Neo-klasik tidak bisa menjelaskan secara detail mengenai peranan teknologi dalam jangka panjang. Teori pertumbuhan endogen memusatkan perhatiannya pada sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai modal utama

dalam meningkatkan produksi serta pertumbuhan ekonomi, sehingga teori ini sangat relevan digunakan untuk negara-negara berkembang. Model teori pertumbuhan endogen terdiri dari 2 jenis model yaitu model modal manusia (*Human Capital Model*) dan model penelitian dan pembangunan (*Research and Development Model*).

Model modal manusia (*Human Capital Model*) yang dirintis oleh P.Romer pada tahun 1983, 1986, 1996. R.Lucas pada tahun 1988 serta Robelo pada tahun 1990 memusatkan pada akumulasi modal yang terdiri dari berbagai jenis seperti modal fisik, modal manusia, modal kesehatan, dan lainnya yang dapat berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Sedangkan model penelitian dan pembangunan (*Research and Development Model*) yang dirintis oleh P.Romer pada tahun 1990 memusatkan pada kemajuan teknologi, dengan adanya kemajuan teknologi tersebut akan dapat menghasilkan inovasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan berujung pada peningkatan pertumbuhan ekonomi (Mankiw, 2006:231). Selain itu, perkembangan teori pertumbuhan endogen mempunyai 2 cabang pemikiran. Pertama melalui perilaku *learning by-doing*, yang menjelaskan mengenai adanya pengenalan hal-hal baru dalam perekonomian yang bisa menjadi faktor pendorong dalam peningkatan produktivitas perekonomian, yang kedua yaitu melalui penemuan-penemuan baru, dimana penemuan baru tersebut merupakan sumber utama dalam meningkatkan produktivitas perekonomian. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam meningkatkan produktivitas perekonomian. Berikut merupakan fungsi persamaan dalam model pertumbuhan endogen :

$$Y_t = K_t^a H_t^B (A_t L_t)$$

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam model pertumbuhan ekonomi endogen, besarnya output bergantung kepada besarnya persediaan modal fisik (K), tenaga kerja (L), modal manusia (H) serta penggunaan tingkat teknologi (A). Pada dasarnya teori ini berhubungan dengan penekanan terhadap investasi modal manusia dalam suatu pembangunan serta penggunaan teknologi dianggap sebagai pemenuhan untuk tenaga kerja yang lebih berpengalaman.

Dalam pertumbuhan ekonomi, indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan Badan Pusat Statistik yaitu Produk Domestik Bruto (PDB). PDB yaitu jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha, dengan menggunakan faktor produksi baik milik warga negara lokal ataupun warga negara asing (Telisa, 2019:19). Sedangkan indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan nilai tambah bruto dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul karena adanya berbagai aktivitas ekonomi. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di suatu daerah dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Laju Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

$PDRB_t$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$ = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun sebelumnya

2.1.3 Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia adalah perluasan kebebasan nyata yang bisa dinikmati oleh manusia. Kebebasan tersebut bergantung pada faktor sosial serta ekonomi seperti akses pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta politik (Amartya Sen, 1989). Sedangkan berdasarkan *The United Nations Development Programme* (UNDP) pembangunan manusia yaitu suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang bisa ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Pembangunan manusia merupakan objek sekaligus subjek dalam sebuah pembangunan negara, dimana manusia menjadi sasaran utama sekaligus pelaku di dalam sebuah pembangunan.

Untuk melihat perkembangan kualitas pembangunan manusia suatu wilayah berdasarkan *The United Nations Development Programme* (UNDP) digunakan indikator Human Development Indeks (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berdasarkan Badan Pusat Statistik IPM diperkenalkan oleh *The United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR). IPM atau HDI berdasarkan *The United Nations Development Programme* (UNDP) merupakan ukuran yang digunakan dalam mengukur capaian pembangunan manusia yang terdiri dari tiga komponen dasar yaitu umur yang panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup yang layak yang masing-masing ketiga komponen tersebut terdiri dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan, serta dimensi ekonomi.

Pengukuran nilai IPM yang dijadikan sebagai bahan tolak ukur berkisar dari angka 0 sampai 100. Nilai IPM tersebut digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh wilayah atau daerah tersebut telah mencapai sasaran yang ditentukan dalam mencapai kualitas pembangunan manusianya. Apabila nilai IPM di suatu daerah mendekati angka 100, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusianya semakin baik, begitupun sebaliknya apabila nilai IPM di suatu daerah menjauhi angka 100, maka hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusianya kurang baik.

- **Komponen Pembentuk IPM**

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022), komponen pembentuk IPM terdiri dari usia harapan hidup (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan serta standar hidup layak.

1. Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup menggambarkan usia maksimum yang diharapkan seseorang untuk dapat bertahan hidup. Usia harapan hidup diukur dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Berdasarkan Badan Pusat Statistik AHH yaitu rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang bisa ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

2. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan dua indikator gabungan yaitu indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). HLS menggambarkan lamanya sekolah formal (dalam tahun) yang diharapkan

dapat dirasakan oleh anak yang berumur tertentu (umur 7 tahun) dimasa yang akan datang. Sedangkan RLS menggambarkan rata-rata lamanya penduduk yang berusia 25 tahun keatas yang telah atau sedang menjalani pendidikan formal.

3. Standar Hidup Layak

Untuk mengukur standar hidup layak digunakan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan, indikator tersebut ditentukan dari nilai pengeluaran perkapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity/PPP*).

- **Perhitungan IPM**

Berdasarkan (BPS, 2022) perhitungan IPM terhadap komponen pembentuk IPM, dapat dirumuskan sebagai berikut :

a). Indeks Kesehatan, diukur dengan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{Kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{max} - AHH_{min}}$$

b). Indeks Pendidikan, diukur dengan menjumlahkan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), perhitungan indeks pendidikan, HLS dan RLS digunakan rumus sebagai berikut :

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$$

$$I_{Pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

c). Indeks Standar Layak Hidup, diukur dengan menggunakan indikator tingkat pengeluaran dengan rumus sebagai berikut :

$$I_{Pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{max}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Berdasarkan perhitungan ketiga komponen pembentuk IPM tersebut, maka rumus umum untuk menghitung IPM sebagai berikut:

$$IPM = \frac{1}{3} (I_{Kesehatan} + I_{Pendidikan} + I_{Pengeluaran})$$

2.1.4 Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat yaitu suatu keadaan yang memperlihatkan kondisi kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut. Sedangkan Menurut P.Todaro dan Stephen C. Smith (2006) dalam “Pembangunan Ekonomi” mengatakan bahwa kesejahteraan masyarakat adalah kondisi tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat yang bisa dilihat dari kondisi rumah yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, pendidikan serta kesehatan. Kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terlepas dari paradigma pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi suatu wilayah dikatakan berhasil apabila tingkat kesejahteraan masyarakatnya semakin baik. Untuk melihat kondisi kesejahteraan masyarakat, digunakan indikator kesejahteraan masyarakat.

Secara umum, ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya :

1. Pendapatan Masyarakat

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila jumlah pendapatan yang diterima mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder ataupun tersier.

2. Pendidikan

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan akan pendidikannya terpenuhi serta didukung oleh fasilitas yang memadai dan terjangkau.

3. Kesehatan

Masyarakat dikatakan sejahtera apabila kualitas kesehatannya baik serta didukung oleh fasilitas dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS, 2022) menerangkan bahwa indikator yang dapat digunakan dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, diantaranya:

1. Kesehatan

Tingkat kualitas kesehatan masyarakat merupakan indikator yang penting dalam menggambarkan kondisi pembangunan manusia suatu daerah. Semakin sehat kondisi masyarakat, maka akan semakin mendukung proses serta dinamika pembangunan ekonomi di suatu daerah akan semakin baik. Hal tersebut dikarenakan hasil dari kegiatan perekonomian yaitu tingkat produktivitas penduduk

di suatu daerah dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.

2. Pendidikan

Pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan terhadap suatu pembangunan sekaligus merupakan investasi sumber daya manusia. Pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan tersebut akan menjadikan masyarakat memiliki kecakapan dalam rangka pembangunan manusia yang pada akhirnya dapat mendukung kesejahteraan masyarakat.

3. Kependudukan

Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur oleh jumlah dan laju pertumbuhan penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk yang tidak terkontrol maka akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam kependudukan, sehingga dalam hal penentuan kebijakan pula akan semakin banyak yang perlu dipertimbangkan terkait penyediaan berbagai sarana dan prasarana agar kesejahteraan masyarakat terjamin.

4. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Dimana, jika terjadi masalah dalam ketenagakerjaan maka hal tersebut akan berdampak pada penurunan tingkat kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Adapun masalah ketenagakerjaan yang dihadapi oleh pemerintah diantaranya, masalah tingginya tingkat pengangguran,

rendahnya kesempatan kerja yang terbuka, serta rendahnya produktivitas jumlah tenaga kerja.

5. Pola Konsumsi

Pola konsumsi masyarakat adalah salah satu indikator sosial ekonomi masyarakat yang sangat dipengaruhi oleh budaya dan lingkungan suatu daerah. Dimana budaya dan lingkungan tersebut dapat membentuk pola kebiasaan pada kelompok masyarakat. Pola konsumsi rumah tangga secara umum dapat dilihat dengan indikator proporsi pengeluaran baik pengeluaran untuk makanan ataupun non makanan. Sehingga komposisi pengeluaran konsumsi rumah tangga tersebut dapat di jadikan sebagai gambaran dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu daerah.

6. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang meliputi berbagai aspek kehidupan, yang meliputi aspek ekonomi, sosial serta budaya. Semakin kecil angka kemiskinan suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan semakin baik.

7. Perumahan dan Lingkungan

Rumah termasuk kedalam salah satu kebutuhan primer sekaligus kebutuhan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Dimana selain menjadi tempat tinggal, rumah juga merupakan sarana pengamanan dan pemberian ketentraman hidup bagi manusia dan sekaligus menyatu dengan lingkungan. Kualitas dan

kondisi lingkungan rumah tinggal dapat mempengaruhi status kesehatan penghuninya, dimana hal tersebut dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat penghuninya.

8. Sosial Lainnya

Globalisasi telah mendorong perubahan pola hidup masyarakat. Dengan didukung oleh teknologi yang canggih, seolah-olah membuat akses dunia tanpa batas, sehingga tingkat kebutuhan pun mulai mengalami pergeseran dari kebutuhan sekunder dan tersier berubah menjadi kebutuhan primer. Semakin derasnya arus globalisasi, maka semakin membuka kesempatan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan perekonomiannya sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

- **Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat**

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, yang terbagi kedalam faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya jumlah anggota keluarga, tempat tinggal, keadaan sosial keluarga, serta keadaan ekonomi keluarga.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, diantaranya manusia, alam, ekonomi negara, serta nilai hidup.

2.1.5 Konsumsi Rumah Tangga

Definisi konsumsi secara lebih luas mengambil dari dua istilah bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda konsumsi berasal dari kata "*Consumptie*" yang berarti semua kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengambil kegunaan pada barang atau jasa. Sedangkan dalam bahasa Inggris konsumsi berasal dari kata "*Consumption*" yaitu penggunaan, pemanfaatan, dan atau pengeluaran terhadap barang dan jasa. Yang dimaksud dengan konsumsi yaitu kegiatan pemakaian terhadap barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, pengobatan, perumahan, dan mobil (Mankiw, 2006:11) (dalam Telisa 2019:189). Dalam teori ekonomi makro, konsumsi dilambangkan dengan huruf "C" (*Consumption*) sehingga termasuk kedalam klasifikasi konsumen rumah tangga. Adapun pengertian konsumsi rumah tangga yaitu pemakaian terhadap barang dan jasa yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia berdasarkan besarnya pendapatan yang di peroleh.

Apabila dilihat dari perhitungan makro, maka perhitungan dari seluruh penjumlahan pengeluaran–pengeluaran belanja serta konsumsi masing–masing rumah tangga dalam suatu daerah disebut sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga suatu daerah (Sudirman, 2018). Suherman rasyidi dalam (Viki Sugandi Haniko, dkk : 2022) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pengeluaran rata–rata konsumsi rumah tangga yaitu jumlah pengeluaran rata-rata barang dan jasa yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia.

2.1.5.1 Teori Konsumsi Keynes

Teori Konsumsi Keynes dikenal dengan Teori Hipotesis Pendapatan Absolut (*Absolut Income Hypothesis*) dimana dalam teori ini, Keynes menyatakan tentang konsumsi seseorang secara absolut ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan atau dengan kata lain $C = f(Y)$, walaupun ada faktor lain yang juga menentukan, maka menurut Keynes faktor-faktor tersebut tidak berarti apa-apa dan sangat tidak menentukan dalam besarnya konsumsi. Keynes menyatakan terdapat tiga asumsi pokok secara makro dalam teorinya, diantaranya:

- Pertama, Keynes berasumsi bahwa apabila konsumsi meningkat, maka pendapatan pun akan meningkat. Tetapi, besarnya peningkatan konsumsi tidak akan sebesar peningkatan pendapatan, hal ini dikarenakan adanya batasan dari Keynes sendiri bahwa besarnya kecenderungan mengkonsumsi marginal (*Marginal Propensity to Consume/MPC*) adalah antara nol dan satu, serta besarnya perubahan konsumsi selalu berada diatas 50% dari besarnya perubahan pendapatan ($0,5 < MPC < 1$).
- Kedua, Keynes berasumsi bahwa kecenderungan mengkonsumsi rata-rata (*Average Propensity to Consume/APC*) akan turun ketika pendapatan seseorang naik. Hal tersebut karena menurut Keynes sendiri, peningkatan pendapatan selalu lebih besar dari pada peningkatan konsumsi, sehingga ketika pendapatan naik justru akan memperbesar tabungan. Dengan demikian, muncul satu pernyataan lagi bahwa setiap terjadi peningkatan pendapatan maka rata-rata kecenderungan menabung akan semakin tinggi.

- Ketiga, pendapatan merupakan faktor penentu utama dalam menentukan besarnya konsumsi, sedangkan faktor lain dianggap tidak berarti dalam menentukan besarnya konsumsi.

Selain itu, di dalam teori Keynes dijelaskan juga bahwa konsumsi saat ini (*current consumption*) sangat dipengaruhi oleh pendapatan disposable saat ini (*current disposable income*). Hal ini karena menurut Keynes sendiri ada batas konsumsi minimal yang tidak tergantung dengan tingkat pendapatan. Artinya, tingkat konsumsi tersebut harus terpenuhi meskipun tingkat pendapatannya nol. Itulah yang dinamakan dengan konsumsi *autonomous*.

- Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi yaitu fungsi yang menggambarkan hubungan antara konsumsi rumah tangga (C) dengan pendapatan (Y). Fungsi konsumsi ini dapat di jelaskan dalam persamaan sebagai berikut :

$$C = a + bY \text{ atau } C = bY_d$$

Keterangan :

C = Konsumsi Rumah Tangga

a = Nilai Konsumsi pada saat Y atau $Y_d = 0$ (Konsumsi *Autonomous*)

b = Tambahan Konsumsi yang diakibatkan karena bertambahnya pendapatan
 $(MPC = \frac{\Delta C}{\Delta Y})$

Y = Pendapatan Nasional

Y_d = Pendapatan *Disposable* yaitu pendapatan netto yang siap di belanjakan setelah di kurangi pajak dan subsidi atau transfer. ($Y_d = Y - T_x - T_r$)

Faktor – faktor yang mempengaruhi besarnya konsumsi rumah tangga yaitu :

1. Pendapatan dan Kekayaan Rumah Tangga
2. Tingkat Bunga
3. Perkiraan Harga di Masa Depan
4. Jumlah Anggota Keluarga

2.1.6 Ketenagakerjaan

Menurut Undang–undang No. 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 1 mengenai ketenagakerjaan, yang dimaksud dengan ketenagakerjaan yaitu semua hal yang berhubungan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Sedangkan menurut Undang–undang No. 13 Tahun 2003 Bab 1 pasal 1 ayat 2 mengenai ketenagakerjaan yang dimaksud dengan Tenaga Kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk mendapatkan barang ataupun jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan masyarakat

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting selain sumber alam, modal dan teknologi. Faktor produksi tenaga kerja tersebut juga merupakan faktor produksi berupa tenaga manusia. Berdasarkan sifatnya, tenaga kerja terbagi menjadi dua jenis, diantaranya :

1. Tenaga kerja Jasmani

Tenaga kerja jasmani merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan kekuatan fisik. Contohnya, kuli bangunan, supir angkut, dan sebagainya.

2. Tenaga kerja Rohani

Tenaga kerja rohani merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan kekuatan berpikir serta mengandalkan kinerja otak. Tenaga kerja jenis ini biasanya disebut dengan tenaga kerja professional.

Berdasarkan tingkat kemampuannya, tenaga kerja dikelompokkan menjadi tiga jenis, diantaranya :

1. Tenaga kerja Terdidik

Tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang memerlukan tingkat pendidikan khusus serta biasanya dihasilkan oleh lembaga pendidikan formal, dimulai dari pendidikan dasar (SD) hingga perguruan tinggi (Universitas). Contohnya guru, dosen, dokter, dan sebagainya.

2. Tenaga kerja Terlatih

Tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan serta pelatihan khusus (kursus). Tenaga kerja jenis ini biasanya akan diberi pelatihan serta pengalaman mengenai bidang-bidang tertentu sesuai dengan kemampuannya. Contohnya koki, montir, dan sebagainya.

3. Tenaga kerja tidak Terdidik dan tidak Terlatih

Tenaga kerja jenis ini merupakan tenaga kerja yang tidak membutuhkan pendidikan serta pelatihan, juga tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian dan keterampilan khusus. Contohnya pemulung.

Pengertian tenaga kerja secara umum yaitu seseorang yang termasuk kedalam usia produktif yang sedang bekerja serta termasuk kedalam angkatan kerja dan mampu bekerja untuk menghasilkan barang dan jasa dan mempunyai nilai ekonomis yang bisa berguna untuk kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan bekerja diukur dengan usia, dengan kata lain seseorang yang sudah termasuk kedalam usia kerja, dianggap mampu untuk bekerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Tenaga Kerja terbagi kedalam tiga kelompok yaitu :

1. Tenaga kerja penuh (*Full Employed*)

Tenaga kerja yang memiliki jumlah jam kerja minimal sebanyak 35 jam perminggunya, dan bekerja sesuai dengan keahlian atau pendidikan yang dimilikinya.

2. Tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (*Underemployed*)

Tenaga kerja yang memiliki jam kerja minimal (kurang dari 35 jam perminggunya) sehingga pendapatannya pun dibawah standar minimal.

3. Tenaga yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (*Unemployed*)

Tenaga kerja yang tidak memiliki jumlah jam kerja dalam seminggunya (jam kerja = 0 dalam seminggunya).

Tenaga kerja atau *Man Power* juga terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk yang termasuk kedalam usia produktif (15-64 tahun) yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi, baik yang sedang bekerja, sementara tidak bekerja, atau sedang menganggur karena suatu hal atau sebab lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu setiap orang yang berumur 15 tahun keatas yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, orang yang lanjut usia, orang yang cacat jasmani, serta setiap orang yang tidak melakukan suatu kegiatan dimana kegiatan tersebut termasuk ke dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

2.1.7 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan salah satu bagian dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan serta pengeluaran pemerintah untuk setiap tahunnya, yang terdapat dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Adapun tujuan dari kebijakan fiskal tersebut yaitu untuk menstabilkan harga, tingkat output, dan kesempatan kerja dalam memacu atau mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi. Peran pengeluaran

pemerintah yaitu untuk menunjukkan perannya di dalam perekonomian dalam rangka untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera.

Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), alokasi belanja atau pengeluaran negara merupakan salah satu anggaran yang dapat mengurangi kekayaan negara. Secara garis besar, pemerintah mempunyai kewajiban dalam melakukan pengelolaan atas APBN untuk membelanjakannya baik untuk pusat ataupun daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan. Pengeluaran negara dalam APBN tersebut biasanya digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat serta pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

A. Belanja Pemerintah Pusat

Belanja pemerintah pusat adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk urusan pemerintahan. Belanja pusat, dibagi menjadi 3 jenis diantaranya belanja berdasarkan organisasi, belanja berdasarkan fungsi, serta belanja berdasarkan jenisnya.

1. Belanja berdasarkan Organisasi

Belanja berdasarkan organisasi digunakan untuk membiayai kementerian negara yang ada, seperti belanja kementerian dalam negeri, belanja DPR, serta belanja kejaksaan agung. Keputusan belanja organisasi ini biasanya dialokasikan oleh bagian Anggaran Bendahara Umum serta dikelola oleh Kementerian Keuangan.

2. Belanja berdasarkan Fungsi

Belanja berdasarkan fungsi, yaitu belanja yang digunakan untuk berbagai macam fungsinya seperti belanja untuk fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi kesehatan, fungsi pendidikan, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi pariwisata, fungsi agama, serta fungsi perlindungan sosial.

3. Belanja berdasarkan jenis

Belanja berdasarkan jenisnya ini digolongkan kedalam belanja yang terdiri dari beberapa jenis, seperti belanja modal, belanja pegawai, belanja barang, hibah bantuan sosial dan pembayaran bunga, serta belanja lainnya.

B. Belanja Pemerintah Daerah

Belanja pemerintah daerah adalah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk alokasi masyarakat khususnya pelayanan umum. Belanja daerah digunakan oleh pemerintah provinsi, kabupaten serta kota. Tujuan belanja daerah yaitu untuk mensejahterakan daerah serta masyarakatnya. Adapun jenis belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

1. Belanja Daerah Langsung

Belanja daerah langsung merupakan pengeluaran yang digunakan secara langsung untuk program kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja lainnya.

2. Belanja Daerah Tidak Langsung

Belanja daerah tidak langsung merupakan pengeluaran yang digunakan secara tidak langsung untuk program kegiatan. Terdiri dari belanja bunga, subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja subsidi, belanja tidak terduga.

2.1.7.1 Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Menurut Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa pendidikan yaitu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar serta proses pembelajaran, sehingga peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi dirinya untuk mempunyai kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta pengendalian diri dan keterampilan yang dimiliki baik oleh peserta didik, masyarakat, bangsa maupun negara. Sedangkan yang dimaksud dengan Sumber daya pendidikan menurut Undang–undang Nomor 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 ayat 23 yaitu segala sesuatu yang akan digunakan dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang mencakup tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.

Biaya pendidikan termasuk kedalam salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan. Yang dimaksud biaya dalam hal ini yaitu semua jenis pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan, baik dalam bentuk uang ataupun barang serta tenaga kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan adalah alokasi anggaran fungsi pendidikan yang digunakan dalam

penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam Undang–undang Nomor 20 tahun 2003 Pasal 31 ayat 4 tentang pengalokasian dana pendidikan dikatakan bahwa besarnya dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan, dialokasikan sebesar sekurang–kurangnya (minimal) 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ataupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

2.1.7.2 Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Menurut Undang–undang No. 36 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 1 tentang Kesehatan, menyatakan yang dimaksud dengan kesehatan yaitu kondisi sehat baik secara fisik, mental, spiritual ataupun sosial yang memungkinkan setiap orang bisa hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber daya bidang kesehatan menurut Undang–undang No. 36 Tahun 2009 Bab 1 Pasal 2 menyatakan bahwa sumber daya bidang kesehatan yaitu semua bentuk dana, tenaga, perbekalan, kesehatan, persediaan farmasi ataupun alat serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Selain itu, mutu/kualitas manusia bisa dilihat dari sisi kesehatan. Dimana, kesehatan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi mutu/kualitas manusia.

Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi salah satu hak dasar rakyat, dimana hak tersebut yaitu rakyat mendapatkan pelayanan dalam bentuk fasilitas serta pelayanan kesehatan yang merupakan prasyarat bagi peningkatan produktivitas masyarakat yang sesuai

dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang kesehatan (Merang Kahang, dkk, 2016). Dalam Undang-undang No. 36 tahun 2009 mengenai aturan anggaran kesehatan disebutkan bahwa besarnya anggaran kesehatan pemerintah pusat dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji, sedangkan besarnya anggaran kesehatan pemerintah daerah berdasarkan Provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi referensi penulis didalam penelitian ini, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Santi Nurmainah (2013): Analisis Pengaruh Belanja Modal, Pemerintah Daerah, Tenaga Kerja Terserap, dan IPM terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).	Untuk mengetahui pengaruh belanja modal, pemerintah daerah, tenaga kerja terserap, dan IPM terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan (studi kasus 35 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal, tenaga kerja terserap, dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.	Variabel terikat menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi.	Variabel bebas, lokasi penelitian, tahun penelitian serta metode penelitian yang digunakannya.
2.	Abu Bakar (2020) : Analisis Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan	Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga dan pengeluaran	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga berpengaruh positif	Salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu konsumsi rumah tangga.	Variabel terikat, lokasi penelitian, tahun penelitian serta metode penelitian yang digunakannya.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika.	pemerintah terhadap IPM Kabupaten Mimika.	dan signifikan terhadap IPM sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap IPM Kabupaten Mimika.		
3.	Andi Hakib (2019): Pengaruh Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan Ekonomi di Sulawesi Selatan Periode 2012-2016.	Untuk mengetahui pengaruh konsumsi rumah tangga dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan periode 2012-2016.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Sulawesi Selatan.	Salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu konsumsi rumah tangga, serta variabel terikatnya pertumbuhan ekonomi.	Lokasi penelitian, tahun penelitian serta metode penelitian yang digunakannya.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Citra Islamiatus Izzah & Ignatia Martha Hendarti (2021) : Analisis Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Upah, dan PDRB Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah.	Untuk mengetahui pengaruh jumlah tenaga kerja, tingkat upah, dan PDRB terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dan PDRB secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, sedangkan tingkat upah secara simultan berpengaruh negatif terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah.	Salah satu variabel bebas yang digunakan yaitu variabel tenaga kerja.	Variabel terikat, lokasi penelitian, tahun penelitian serta metode penelitian yang digunakannya.
5.	Citra Ayu B.E Lubis (2014): Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan Pekerja dan Pengeluaran Pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi	Untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2006-2012.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik tenaga kerja, tingkat pendidikan pekerja dan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap	Variabel bebas yang digunakan yaitu tenaga kerja dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, serta variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.	Lokasi penelitian, tahun penelitian serta metode penelitian yang digunakannya.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	di Indonesia periode 2006-2012.		pertumbuhan ekonomi di Indonesia.		
6.	Dr. H. Tete Saepudin, SE, MSi (2011) : Analisis Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi-provinsi di Indonesia.	Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan investasi (modal), tenaga kerja yang memiliki keahlian, tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran pemerintah untuk pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi-provinsi di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan investasi (modal), tenaga kerja yang tidak memiliki keahlian, rata-rata lama sekolah serta pengeluaran pemerintah untuk pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun tenaga kerja yang memiliki keahlian berpengaruh negatif dan	Variabel terikat menggunakan pertumbuhan ekonomi, serta salah satu variabel bebas menggunakan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.	Metode penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian yang digunakan.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.		
7.	Prof. Dr. H. Horas Djulius, S.E (2018) : <i>The Linkage of Physical and Human Investments in Affecting Gross Domestic Product in Indonesia.</i>	Untuk mengetahui pengaruh antara keterkaitan investasi fisik dan manusia terhadap PDB di Indonesia.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa investasi langsung dalam negeri, investasi asing langsung, dan IPM berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDB di tingkat nasional dan di luar wilayah Jawa. Sedangkan IPM tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB untuk daerah di pulau Jawa.	Variabel terikat menggunakan pertumbuhan ekonomi.	Variabel bebas, metode penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian yang digunakan.
8.	Endang Rostiana, SE, MT & Anggia Rodesbi (2020) :	Untuk menganalisis hubungan transisi demografi dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa transisi demografi yang	Variabel terikat menggunakan pertumbuhan ekonomi.	Variabel bebas, metode penelitian, lokasi penelitian

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	<i>Demographic Transition and Economic Growth in Indonesia.</i>	pertumbuhan ekonomi Indonesia.	diwakili oleh <i>dependency ratio</i> , penduduk usia muda, pertumbuhan modal dan variabel <i>dummy</i> krisis ekonomi secara parsial berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.		dan tahun penelitian yang digunakan.
9.	Marselus Palayukan (2019) : Pengaruh Belanja Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia : Studi Kasus Provinsi Sulawesi Tenggara.	Untuk mengetahui pengaruh belanja pemerintah terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Tenggara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM di Provinsi Sulawesi Tenggara.	Variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan bidang kesehatan.	Variabel terikat, metode penelitian, lokasi penelitian dan tahun penelitian yang digunakan.

No	Nama, Tahun, dan Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Merlin Anggraeni (2017): Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan, Kesehatan, dan Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1970-2015.	Untuk mengetahui pengeluaran pemerintah di beberapa sektor (pendidikan, kesehatan, dan pertanian) terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang maupun jangka pendek.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di beberapa sektor (pendidikan, kesehatan, dan pertanian) secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap PDB Indonesia baik dalam jangka pendek atau panjang,	Beberapa variabel bebas yang digunakan yaitu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan., serta variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.	Lokasi penelitian, tahun penelitian serta metode penelitian yang digunakannya.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yaitu model konseptual mengenai bagaimana hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang sudah dideskripsikan. Berikut merupakan penjelasan mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

Pembangunan ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan pertumbuhan yang maksimal dengan diikuti oleh penyediaan lapangan pekerjaan, serta peningkatan pada bidang pendidikan dan kesehatan. Indikator yang menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah salah satunya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dilihat dari dua arah, dimana pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan sumber daya yang dibutuhkan di dalam pembangunan manusia, begitupun tingkat pembangunan manusia yang tinggi dapat menentukan kemampuan penduduk di suatu daerah dalam melakukan pengelolaan serta penyerapan yang menjadi sumber-sumber bagi pertumbuhan ekonomi. Sehingga keduanya tidak bisa langsung dihubungkan secara linier, namun dapat ditentukan oleh faktor-faktor apa saja yang menghubungkan kedua konsep tersebut salah satunya melalui indikator kesejahteraan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh (Ranis dkk, 2000) dalam (Moh Muqorrobin, 2017) bahwa faktor penentu antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas pembangunan manusia salah satunya melalui peningkatan kualitas modal manusia yang bisa dilihat dari sisi kesehatan dan pendidikan. Dalam hal ini

pendidikan, kesehatan, pola konsumsi dan ketenagakerjaan merupakan indikator yang termasuk kedalam kesejahteraan masyarakat.

Dalam teori Keynes (Telisa, 2019:189) dikatakan bahwa besar kecilnya konsumsi rumah tangga bergantung kepada besar kecilnya pendapatan yang diterima dalam rumah tangga tersebut. Dimana, besar kecilnya pendapatan tersebut dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan, pendapatan merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia melalui pengeluaran perkapitanya. Sehingga semakin besar pendapatan suatu rumah tangga maka pengeluaran konsumsi rumah tangganya semakin meningkat atau pengeluaran perkapitanya semakin naik yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh (Abu Bakar, 2020) yang menyatakan bahwa pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Selain itu, pengeluaran konsumsi rumah tangga juga akan menimbulkan dampak terhadap laju pertumbuhan ekonomi. Dimana, apabila pendapatan masyarakat naik, maka pengeluaran konsumsi rumah tangganya akan ikut naik, seperti yang disebutkan dalam teori Keynes dalam (Andi haib, 2019), bahwa pertumbuhan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh besar kecilnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, karena dengan adanya peningkatan dalam aktivitas konsumsi rumah tangga tersebut maka produksi akan barang konsumsi tersebut ikut meningkat yang pada akhirnya akan memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh (Andi Hakib, 2019) yang

menyatakan bahwa pengeluaran rata-rata konsumsi rumah tangga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Tenaga kerja merupakan faktor yang mempengaruhi output suatu daerah. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor perekonomian akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Selain itu, banyak atau tidaknya jumlah tenaga kerja juga dipengaruhi oleh banyaknya jumlah populasi suatu daerah. Seperti yang dikatakan dalam teori Solow dalam (Mutia sari dkk, 2016) bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan tenaga kerjanya, dengan melihat jumlah populasinya. Dimana jumlah populasi tersebut dapat menyebabkan naiknya jumlah tenaga kerja, dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja maka produksi yang dihasilkan oleh tenaga kerja pun akan semakin besar dan hal tersebut akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh (Citra Ayu B.E Lubis, 2014) yang menyatakan bahwa jumlah tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, menurut Samuelson serta Nordhaus (2001) dalam (Citra Ayu Basica E.L, 2014) mengatakan bahwa yang menjadi input tenaga kerja yaitu kualitas serta keterampilan masyarakatnya. Yang dimaksud dengan kualitas tersebut yaitu keterampilan, pengetahuan, serta kedisiplinan. Dimana, dengan meningkatnya kualitas dan keterampilan tersebut maka akan meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Dengan tingginya produktivitas tersebut akan menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas yang pada akhirnya akan memperoleh hasil produksi yang banyak. Dengan banyaknya hasil produksi tersebut maka pendapatan yang diterima pun akan semakin besar dan tentunya

konsumsinya pun akan semakin naik. Naiknya pendapatan serta konsumsi akan memberikan dampak terhadap kualitas pembangunan manusianya. Oleh karena itu jumlah dan produktivitas tenaga kerja dapat memberikan dampak terhadap kualitas pembangunan manusia. Hal ini didukung dalam penelitian yang dilakukan oleh (Citra Islamiatus Izzah & Ignatia Martha Hendarti, 2021) yang menyatakan bahwa tenaga kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM.

Investasi dalam kategori pendidikan merupakan hal yang mutlak dibutuhkan, oleh karena itu pemerintah harus dapat membangun sarana dan prasarana sistem pendidikan yang baik. Pembangunan sarana dan prasarana tersebut diwujudkan dalam alokasi anggaran pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang merupakan wujud nyata dari investasi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 31 ayat 4 disebutkan bahwa alokasi anggaran pemerintah disektor pendidikan sebesar 20% dari APBN ataupun APBD. Menurut E. Setiawan (2006) dampak dari adanya pembangunan dalam sektor pendidikan tersebut akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih berkualitas, dan berdampak terhadap peningkatan pembangunan manusia. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia maka produktivitas sumber daya manusianya akan meningkat, dengan meningkatnya produktivitas sumber daya manusia menyebabkan pendapatan masyarakatnya akan naik sehingga permintaan produksi terhadap barang dan jasa ikut naik. Dengan naiknya tingkat produksi tersebut maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonominya. Hal ini didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marselus Palayukan, 2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah

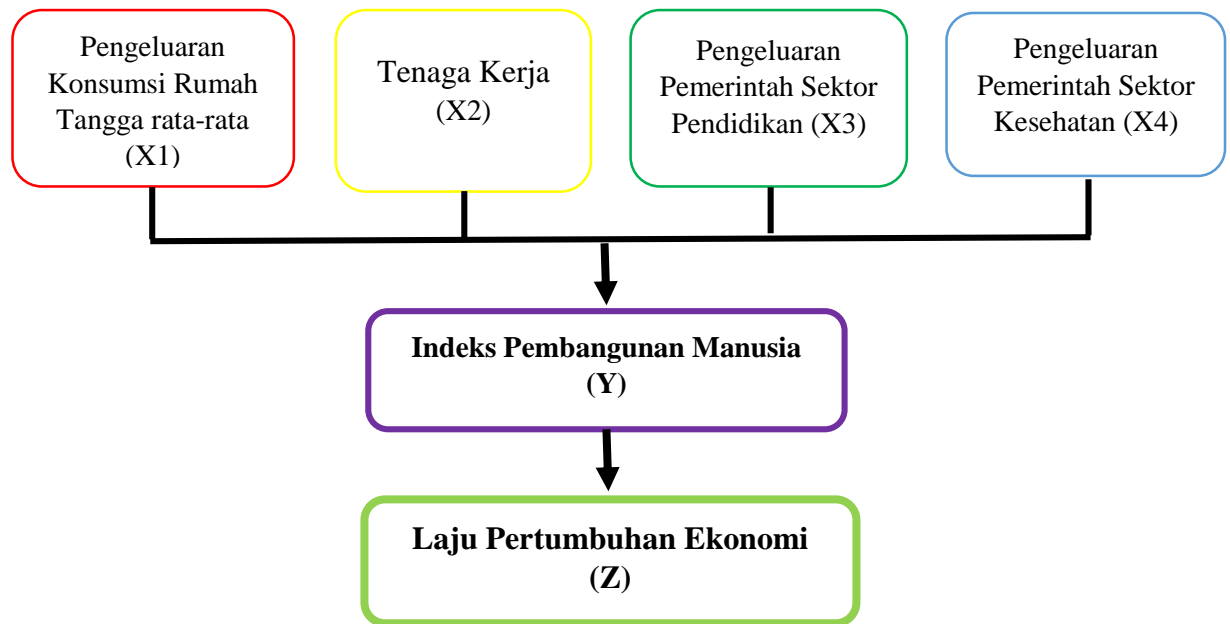
bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, serta penelitian yang dilakukan oleh (Merlin Anggraeni, 2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan salah satunya dengan cara memperbaiki kualitas pembentukan modal manusianya. Modal manusia tersebut bisa dilihat dari sisi sosialnya yaitu dengan membutuhkan penghidupan yang layak melalui kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang menjadi dasar dalam pembangunan suatu daerah. Salah satu upaya untuk mendukung aspek kesehatan yaitu melalui pengeluaran pemerintah sektor kesehatan. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 menyebutkan bahwa besarnya alokasi anggaran pemerintah di sektor kesehatan sebesar 5% dari APBN di luar gaji dan 10% dari APBD di luar gaji. Dengan adanya dukungan pemerintah pada sektor kesehatan, hal tersebut diharapkan dapat mampu meningkatkan kualitas modal manusia dalam suatu pembangunan. Sehingga apabila kualitas modal manusia dari sisi kesehatan meningkat, maka hal tersebut akan memberikan dampak terhadap pembangunan manusia. Semakin tinggi kualitas pembangunan manusia maka produktivitas sumber daya manusianya akan meningkat, dengan meningkatnya produktivitas sumber daya manusia menyebabkan pendapatan masyarakatnya akan naik sehingga permintaan produksi terhadap barang dan jasa ikut naik. Dengan naiknya tingkat produksi tersebut maka akan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonominya. Hal ini didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh (Marselus Palayukan, 2019) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang

kesehatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, serta penelitian yang dilakukan oleh (Merlin Anggraeni, 2017) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa relasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dapat dilihat dari dua arah. Menurut Ramirez, dkk (1998) dalam (Eka Pratiwi.L & Paidi Hidayat) pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan persediaan sumber daya yang dibutuhkan dalam pembangunan manusia, dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan penduduk, taraf hidup yang layak, serta pendidikan dan kesehatan yang pada akhirnya kemakmuran masyarakatnya akan terjamin sehingga Pembangunan Manusia akan semakin baik, selain itu dengan meningkatnya sumber daya manusia bersamaan dengan meningkatnya alokasi sumber daya yang tepat dan distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja maka akan mendorong pembangunan manusia menjadi lebih baik. Begitupun sebaliknya pembangunan manusia akan mendorong laju pertumbuhan ekonomi, karena tingkat pembangunan manusia yang tinggi bisa menentukan kemampuan penduduk di suatu daerah dalam melakukan pengelolaan yang menjadi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi. Hal ini didukung pula dalam penelitian yang dilakukan oleh (Santi Nurmainah, 2013) yang menyatakan bahwa pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penjelasan di atas, adapun kerangka pemikiran ini yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara dan tentunya masih harus dibuktikan kebenarannya. Berikut merupakan Hipotesis pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengeluaran rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, serta Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan diduga berpengaruh positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat
2. Indeks Pembangunan Manusia diduga berpengaruh positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.
3. Pengeluaran rata-rata Konsumsi Rumah Tangga, Tenaga Kerja, Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, serta Pengeluaran Pemerintah

Sektor Kesehatan diduga berpengaruh positif terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kab/Kota Provinsi Jawa Barat.